

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBAGUNAN
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta



LAPORAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
S.D. TRIWULAN II TAHUN 2022

PE11.03/LPP-44/PW12/P3A/2022

8 JULI 2022



Nomor : PE.11.03/LPP-44/PW12/P3A/2022

8 Juli 2022

Lampiran : Empat Eksemplar

Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta s.d.
Triwulan II Tahun 2022

Yth. Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta
di tempat

Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta s.d. Triwulan II Tahun 2022.

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta Nomor PE.11.03/ST-351/PW12/6/2022 Tanggal 27 Juni 2022.

2. Pencapaian Target *Outcome* sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2022, Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta mempunyai 32 indikator kinerja kegiatan (IKK). Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 capaian kinerja diuraikan sebagai berikut:

1) IKK: Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi

Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp 0,00

Target IKK "Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi" pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp701.000.000,00. Target atas IKK tersebut ditetapkan dalam triwulan III dan IV Tahun 2022, sehingga belum ada penetapan target maupun capaian realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.

IKK "Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi" diukur dengan jumlah kurang bayar penerimaan daerah (pajak dan retribusi) yang sudah disetorkan/ditetapkan atas hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi” sebagai berikut:



2) IKK: Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi

Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp 4.928.678.670,00

Target IKK “Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi” pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.394.490.000,00. Target atas IKK tersebut ditetapkan dalam Triwulan III Tahun 2022, sehingga belum ada penetapan target sampai dengan Triwulan II Tahun 2022. Namun demikian realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sudah tercapai sebesar Rp4.928.678.670,00, atau 205,83% (maksimal 120,00%) dari target Tahun 2022 sebesar Rp2.394.490.000,00.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra periode Tahun 2020-2024 sebesar Rp1.714.000.000,00 maka capaian potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 telah tercapai 287,55%.

IKK “Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi” diukur dengan jumlah selisih dari potensi penerimaan daerah dari hasil kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta dengan target yang dianggarkan oleh Daerah.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



3) IKK: Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara/ Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp 123.064.570.000,00

Target IKK “Nilai efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah” pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp154.478.000.000,00, dan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah Rp 75.000.000.000,00. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

telah terealisasi sebesar Rp123.064.570.000,00 atau 164,09% dari Target sebesar Rp 75.000.000.000,00, dan telah tercapai 79,66% dari target Tahun 2022 sebesar Rp154.478.000.000,00.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra periode Tahun 2020-2024 sebesar Rp112.939.000.000,00 maka capaian nilai efisiensi pengeluaran negara/daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 telah tercapai 108,97%.

IKK “Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah” diukur dengan nilai pengurangan/pengalihan rencana belanja proyek/program/kegiatan yang tidak tepat.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah” dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Capaian Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah sebesar Rp123.064.570.000,00 merupakan hasil dari penugasan evaluasi Perencanaan dan Penganggaran, berupa temuan potensi tidak efektif dan tidak efisien yang dilakukan pada tiga Pemerintah Daerah.

4) IKK: Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah

Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp765.960.000,00

Target IKK “Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah” pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp99.430.000.000,00. Target atas IKK tersebut ditetapkan dalam Triwulan III dan IV Tahun 2022, sehingga belum ada penetapan target sampai dengan Triwulan II Tahun 2022. Namun demikian sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sudah terdapat realisasi sebesar Rp765.960.000,00 atau 0,77% dari target Tahun 2022 sebesar Rp99.430.000.000,00.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra periode Tahun 2020-2024 sebesar Rp103.964.000.000,00 maka capaian nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 telah tercapai 0,74%.

IKK “Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah” diukur dengan nilai belanja yang dikembalikan ke kas negara/daerah termasuk denda dari hasil pengawasan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta dan nilai aset yang dipulihkan.

Perbandingan target dan realisasi “Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Capaian Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah sebesar Rp765.960.000,00 merupakan hasil dari penugasan audit PKKN dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS sebesar Rp299.960.000,00 dan Audit Keuangan atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri sebesar Rp466.000.000,00.

5) IKK: Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target

Target IKK “Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target” pada Tahun 2022 adalah sebanyak 1 PSN. Target atas IKK tersebut ditetapkan dalam Triwulan IV Tahun 2022, sehingga belum ada penetapan target sampai dengan Triwulan II Tahun 2022. Namun demikian sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sudah terealisasi sebanyak 2 PSN atau 200,00% (maksimal 120,00%) dari target Tahun 2022 sebanyak 1 PSN.

Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sejumlah 2 PSN

PSN yang tercapai sesuai target yaitu:

- PSN Pembangunan Infrastruktur Bandara Udara Internasional Yogyakarta pada PT. Angkasa Pura I (Persero)
- PSN Pembangunan Akses Kereta Api Bandara Baru Yogyakarta-Kulon Progo pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah.

IKK “Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target” diukur dengan jumlah PSN yang tercapai target atas total jumlah PSN yang dilakukan pengawasan.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



6) IKK: Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan

Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 0,00 %

Target IKK “Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan” pada Tahun 2022 adalah sebesar 85,00%. Target atas IKK tersebut ditetapkan dalam Triwulan IV Tahun 2022, sehingga belum ada penetapan target maupun capaian realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.

Hambatan kelancaran pembangunan (HKP) adalah sebuah kondisi dimana proses pembangunan tidak dapat mencapai *output*, *outcome* dan manfaat yang ditetapkan karena adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan kewenangan para pihak terkait. IKK Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan diukur dengan jumlah laporan evaluasi hasil kelancaran pembangun (LEHKP) yang kesepakatnya terlaksana dibagi dengan total penugasan EHKP yang diterbitkan.

Perbandingan target dan realisasi “Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



7) IKK: Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik

Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sejumlah 0

Target IKK “Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik” pada Tahun 2022 adalah sejumlah 1 BUMN. Target atas IKK tersebut ditetapkan dalam Triwulan III Tahun 2022, sehingga belum ada penetapan target maupun capaian realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.

IKK Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik, pengukurannya dari jumlah BUMN yang tata kelolanya baik dari kegiatan *Assessment Good Corporate Governance*.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



8) IKK: Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat

Jumlah BUMD dengan kinerja sehat sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 11 BUMD

Target IKK “Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat” pada Tahun 2022 sebanyak 11 BUMD. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sudah terealisasi sebesar 11 BUMD atau tercapai 100,00% dari target Tahun 2022 maupun target akhir Renstra 2020-2024 sebesar 11 BUMD.

IKK “Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat” diukur dari jumlah BUMD dengan kinerja sehat dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun *assessor* lainnya berdasarkan kriteria penilaian mencapai kategori “Sehat” Rincian BUMD dengan kinerja sehat hasil evaluasi kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Nama BUMD	Skor ^{*)}	Predikat
1.	Perumda Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul	3,37	Sehat
2.	Perumda Air Minum Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo	3,59	Sehat
3.	Perumda Air Minum Tirta Sembada Kabupaten Sleman	2,99	Sehat
4.	Perumda Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta	3,25	Sehat
5.	Perumda Air Minum Tirta Projtamansari, Kabupaten Bantul	3,80	Sehat
6.	Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa, Kabupaten Kebumen	3,81	Sehat
7.	Perumda Air Minum Tirta Wijaya, Kabupaten Cilacap	3,40	Sehat
8.	Perumda Air Minum Kota Magelang	2,87	Sehat
9.	Perumda Air Minum Tirta Merapi Kabupaten Klaten	4,13	Sehat
10.	Perumda Air Minum Tirta Gemilang, Kabupaten Magelang	3,60	Sehat
11.	Perumda Air Minum Tirta Perwitasari, Kabupaten Purworejo	3,49	Sehat

Keterangan:

*) nilai hasil evaluasi kineja belum validasi pusat, validasi rencana di triwulan III Tahun 2022

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



9) IKK: Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat.

Jumlah BLUD dengan kinerja sehat sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 1 BLUD

Target IKK “Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat” pada Tahun 2022 sebanyak 1 BLUD. Target atas IKK tersebut ditetapkan dalam Triwulan III , sehingga belum ada penetapan target sampai dengan Triwulan II Tahun 2022. Namun demikian sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sudah terealisasi sebanyak 1 BLUD atau telah tercapai 100,00% dari target Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan targe akhir renstra Tahun 2020 - 2024 telah tercapai 50,00% dari target sebanyak dua BLUD. IKK “Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat” diukur dari jumlah BLUD dengan kinerja sehat dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun assessor lainnya berdasarkan kriteria penilaian mencapai kategori “Sehat”. Jumlah BLUD dengan kinerja sehat yaitu RSUD Sudirman Kabupaten Kebumen berdasarkan evaluasi kinerja dengan nilai 70,50 dengan kategori sehat. Perbandingan target dan realisasi “Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



10) IKK: Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan

Jumlah BUMDes yang mampu menyusun Laporan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 14 BUMDes

Target IKK “ Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan ” pada Tahun 2022 sebanyak 19 BUMDes, dan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 14 BUMDes. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 telah terealisasi sebanyak 14 BUMDes atau 100,00% dari Target sebanyak 14

BUMDes, dan telah tercapai 73,68% dari target Tahun 2022 sebanyak 19 BUMDes. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra periode Tahun 2020-2024 sebanyak 26 BUMDes maka capaian “Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan” sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 telah tercapai 53,85%.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan” dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:



11) IKK: Presentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti

Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 100%

Target IKK “ Presentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti” pada Tahun 2022 adalah 100%, dan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 100%. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 telah terealisasi sebesar 100% dari target sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 maupun target Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra periode Tahun 2020-2024 sebesar 100 % maka capaian “Presentase Hasil

Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti” sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 telah tercapai 100%.

Pengawasan BPKP Bidang Investigasi yang bersifat represif dalam konteks untuk pengendalian korupsi meliputi pelaksanaan audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN), pemberian keterangan ahli. IKK“ Presentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti” diukur dengan jumlah KLPBU/APH yang menindaklanjuti rekomendasi jumlah penugasan pengawasan dibagi dengan jumlah pengawasan represif.

Capaian 100 % merupakan tindak lanjut berupa Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di Hadapan Penyidik atas Perkara Dugaan Tipikor atas *Jasa Fullboard Meeting* pada suatu unit kerja.

Perbandingan target dan realisasi " Presentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti" dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:



12) IKK: Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti

Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 100,00%

Target IKK “Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti” pada Tahun 2022 sebesar 80,00%. Target atas IKK tersebut ditetapkan dalam Triwulan III Tahun 2022, sehingga belum ada penetapan target sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.

Namun demikian sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sudah ada realisasi sebesar 100,00% atau tercapai telah tercapai 125,00% (maksimal 120,00%)

dari target Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra Tahun 2020 - 2024 telah tercapai 111,11% dari target sebesar 90,00%.

Kinerja efektivitas hasil pengawasan ini diukur dengan menghitung hasil pengawasan edukatif dan preventif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti dengan penugasan pengawasan preventif/edukatif yang telah dilaksanakan.

Perbandingan target dan realisasi "Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti" dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



Capaian kinerja tersebut didukung dengan pemanfaatan hasil pengawasan edukatif dan preventif atas kegiatan berikut:

- Penyusunan profil risiko *fraud* atas Perencanaan dan Penganggaran APBD pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
- Penyusunan profil risiko *fraud* atas Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan pada Kabupaten Sleman;
- Penyusunan profil risiko *fraud* atas kemudahan berusaha dan berinvestasi dengan penerapan *Online Single Submission (OSS)* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo.

Ketiga hasil kegiatan tersebut seluruhnya dimanfaatkan untuk pengendalian kecurangan.

13) IKK: Jumlah Pemda menindak lanjuti *Area Of Improvement* dari hasil pengukuran EPK

Jumlah Pemda menindak lanjuti *Area Of Improvement* dari hasil pengukuran EPK Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 2 Pemda

Target IKK “Jumlah Pemda menindak lanjuti *Areas Of Improvement* dari hasil pengukuran EPK” pada Tahun 2022 sebanyak 1 Pemda. Target atas IKK tersebut ditetapkan dalam Triwulan III Tahun 2022, sehingga belum ada penetapan target sampai dengan Triwulan II

Tahun 2022. Namun demikian sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sudah terealisasi sebanyak 2 Pemda atau tercapai 200,00% (maksimal 120,00%) dari target Tahun 2022 sebanyak 1 Pemda. Jumlah Pemda menindak lanjuti *Area Of Improvement* dari hasil pengukuran EPK yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

IKK ini merupakan IKK baru yang muncul di Tahun 2022 sehingga belum ada target di akhir periode renstra Tahun 2020-2024.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah Pemda menindak lanjuti *Areas Of Improvement* dari hasil pengukuran EPK” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



14) IKK: Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 1 APIP

Target IKK “Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” pada Tahun 2022 sebanyak 1 APIP. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 telah mencapai 100,00% dari target Tahun 2022 maupun akhir renstra tahun 2020-2024 sebanyak 1 APIP. Capaian Kapabilitas APIP \geq Level 3 berdasarkan SP-

2388/D3/01/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan menggunakan pedoman Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penilaian Kapabilitas APIP dan belum dilakukan evaluasi kembali menggunakan pedoman yang baru yaitu Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada K/L/D. Jika dibandingkan dengan target periode akhir renstra Tahun 2020 – 2024 telah tercapai 100%.

IKK Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 diukur berdasarkan hasil penetapan level kapabilitas APIP dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP. Target dan realisasi IKK Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 bersifat kumulatif.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



15) IKK: Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 11 APIP

Target IKK “Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” pada Tahun 2022 sebanyak 11 APIP. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 telah mencapai 100,00% dari target Tahun 2022 maupun akhir renstra tahun 2020-2024 sebanyak 11 APIP. Capaian tersebut berdasarkan penilaian dengan pedoman Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penilaian Kapabilitas APIP dan belum dilakukan evaluasi

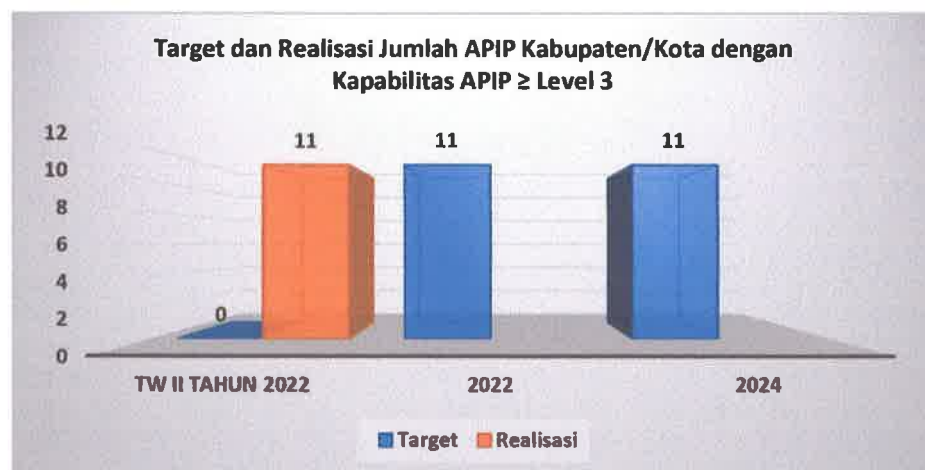
kembali menggunakan pedoman yang baru yaitu Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada K/L/D.

IKK Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 diukur berdasarkan hasil penetapan level kapabilitas APIP dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP. Target dan realisasi IKK Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 bersifat kumulatif.

Capaian sasaran kegiatan APIP Kabupaten/Kota yang sudah mencapai Kapabilitas APIP level 3 sebagai berikut:

No	Nama APIP	Level	Status
1	Inspektorat Kabupaten Sleman	L3	SP-1917/D3/01/2018, tanggal 21 November 2018
2	Inspektorat Kabupaten Purworejo	L3	SP-745/D3/01/2019, tanggal 14 Mei 2019
3	Inspektorat Kabupaten Kulon Progo	L3	SP-1127/D3/04/2019, tanggal 29 Juli 2019
4	Inspektorat Kabupaten Cilacap	L3	SP-1584/D3/04/2019, tanggal 27 September 2019
5	Inspektorat Kabupaten Magelang	L3	SP-1934/D3/04/2019, tanggal 16 Oktober 2019
6	Inspektorat Kabupaten Gunungkidul	L3	SP-1935/D3/04/2019, tanggal 16 Oktober 2019
7	Inspektorat Kota Yogyakarta	L3	SP-2569/D3/04/2019, tanggal 27 Desember 2019
8	Inspektorat Kabupaten Bantul	L3	SP-2551/D3/04/2019, tanggal 27 Desember 2019
9	Inspektorat Kota Magelang	L3	SP-2600/D3/04/2019, tanggal 27 Desember 2019
10	Inspektorat Kabupaten Klaten	L3	SP-2601/D3/04/2019, tanggal 27 Desember 2019
11	Inspektorat Kabupaten Kebumen	L3	SP-899/D3/04/2021, tanggal 29 Desember 2021

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



16) IKK: Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 1 Provinsi

Target IKK “Jumlah APIP Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” pada Tahun 2022 sebanyak 1 Provinsi. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 telah mencapai 100,00% dari target Tahun 2022 maupun akhir renstra tahun 2020-2024 sebanyak 1 Provinsi. Capaian Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 sebanyak 1 Provinsi dengan menggunakan penilaian Maturitas SPIP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 maupun menggunakan pedoman baru yaitu Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah. Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemda D.I. Yogyakarta berdasarkan Penilaian *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2021. IKK Jumlah Provinsi dengan dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 diukur berdasarkan hasil penetapan level Maturitas SPIP dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP. Target dan realisasi IKK Jumlah Provinsi dengan dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 bersifat kumulatif. Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



17) IKK: Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 11 Kabupaten/Kota

Target IKK “Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” pada Tahun 2022 sebanyak 11 Kabupaten/Kota. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 telah mencapai 100,00% dari target Tahun 2022 maupun akhir renstra tahun 2020-2024 sebanyak 11 Kabupaten/Kota.

Capaian Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 sebanyak 11 Kabupaten/Kota dengan menggunakan penilaian Maturitas SPIP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016.

IKK Jumlah Kabupaten/Kota dengan dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 diukur berdasarkan hasil penetapan level Maturitas SPIP dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP. Target dan realisasi IKK Jumlah Kabupaten/Kota dengan dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 bersifat kumulatif.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



Namun demikian berdasarkan Penilaian *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2021 dengan menggunakan pedoman terbaru yaitu Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah, jumlah kabupaten/kota Pemerintah Daerah dengan Maturitas SPIP Terintegrasi \geq Level 3 sebanyak 4 kabupaten/kota yaitu:

- Kabupaten Sleman;
- Kabupaten Bantul;
- Kota Yogyakarta;
- Kabupaten Cilacap.

18) IKK: Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3

Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 1 Provinsi

Target IKK “Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3” pada Tahun 2022 sebanyak 1 Provinsi. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 telah mencapai 100,00% dari target Tahun 2022 maupun akhir renstra tahun 2020-2024 sebanyak 1 Provinsi. Capaian tersebut berdasarkan berdasarkan Penilaian *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2021 dimana nilai skor MRI pada Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 3,20.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



19) IKK: Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3

Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 0 Kabupaten/Kota

Target IKK “Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3” pada Tahun 2022 sebanyak 3 Kabupaten/Kota. Target atas IKK tersebut ditetapkan dalam Triwulan IV Tahun 2022, sehingga belum ada penetapan target maupun capaian realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.

Perkembangan IKK “Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



20) IKK: Prosentase Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Prosentase desa yang menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 72,79%

Target IKK “Prosentase Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa pada Tahun 2022 sebesar 100,00% dan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 100,00%

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 realisasi Persentase Desa yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebesar 72,79% berdasarkan laporan perkembangan implementasi SISKEUDES Tahun 2022 per 30 Juni 2022.

Perbandingan target dan realisasi Prosentase Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



21) IKK: Jumlah APIP yang mengimplementasikan Siswaskeudes

Jumlah APIP yang mengimplementasikan Siswaskeudes sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 5 APIP

Target IKK “Jumlah APIP yang mengimplementasikan Siswaskeudes pada Tahun 2022 sebanyak 4 APIP, dan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 3 APIP.

Realisasi Jumlah APIP yang mengimplementasikan Siswaskeudes sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 5 APIP atau telah tercapai sebanyak 125,00% dari target tahun 2022 sebanyak 5 APIP, dan tercapai 83,33% dari target renstra 2020-2024 sebesar 6 APIP. APIP yang telah mengimplementasikan siswaskeudes yaitu:

- Inspektorat Kabupaten Bantul;
- Inspektorat Kabupaten Purworejo;
- Inspektorat Kabupaten Klaten;
- Inspektorat Kabupaten Kulon Progo.
- Inspektorat Kabupaten Sleman.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



22) IKK: Prosentase Pemda yang akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah

Prosentase Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 58,33%

Target IKK “Prosentase Pemda yang akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah pada Tahun 2022 dan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 66,67%. Realisasi Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

sebesar 58,33 % atau 7 pemda dari 12 pemda di wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta atau tercapai 87,49 % dari target.

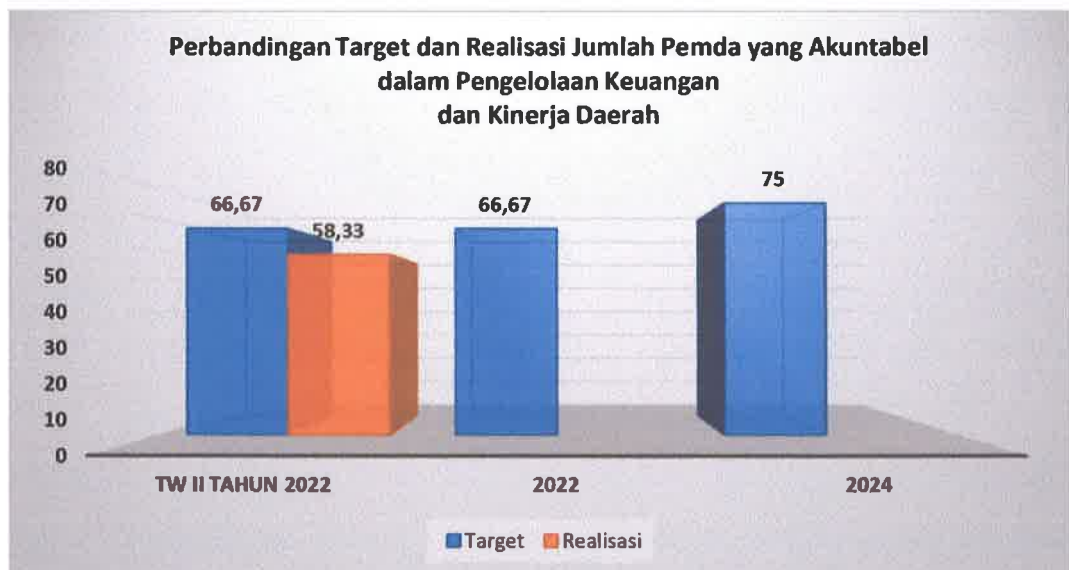
Pemda yang akuntabel (efisien dan efektif) dalam pengelolaan keuangan dan kinerja tercermin dari Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB.

Indikator jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah diukur dengan menghitung jumlah Pemda yang memperoleh Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB.

Realisasi sebanyak 7 pemda berdasarkan capaian opini LKPD Tahun 2021 dan Evaluasi SAKIP Tahun 2021 sebagai berikut:

No	Pemerintah Daerah	Capaian Opini LKPD	Evaluasi SAKIP
1	Provinsi D.I Yogyakarta	WTP	AA
2	Kota Yogyakarta	WTP	A
3	Kabupaten Bantul	WTP	A
4	Kabupaten Sleman	WTP	A
5	Kabupaten Kulon Progo	WTP	A
6	Kabupaten Gunung Kidul	WTP	BB
7	Kabupaten Cilacap	WTP	BB

Perbandingan target dan realisasi IKK “Prosentase Pemda yang Akuntabel Dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



23) IKK: Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai

Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 277 Desa

Target IKK “Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai pada Tahun 2022 sebanyak 135 desa, dan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 55 desa. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai sejumlah

277 desa atau tercapai sebesar 503,63% dari target di triwulan II sebesar 55 desa. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2022 telah tercapai 205,19 % dari target sebesar 135 desa, sedangkan jika dibandingkan dengan target restra 2020-2024 telah tercapai 54,21 % dari target sebesar 511 desa.

Pengelolaan aset desa memadai diukur dari pengujian atas pengendalian intern tata kelola aset desa. Target dan realisasi Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai bersifat kumulatif.

Capaian tersebut adalah berdasarkan hasil evaluasi tata kelola dan akuntabilitas aset desa serta tambahan data di Triwulan II Tahun 2022 (daftar rekap konsolidasi aset) sebagai berikut:

No	Kabupaten	Jumlah Desa
Evaluasi Tahun 2021		
1	Kabupaten Kulon Progo	8
2	Kabupaten Sleman	11
3	Kabupaten Gunungkidul	21
Evaluasi Tahun 2022		
4	Kabupaten Gunungkidul	10
Tambahan dari daftar rekap konsolidasi aset TW II		
5	Kabupaten Gunungkidul	120
6	Kabupaten Kebumen	107
Jumlah		277

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai ” dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



24) IKK: Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3

Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 0 BLUD

Target IKK “Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3 pada Tahun 2022 sebanyak 4 (empat) BLUD. Target atas IKK tersebut ditetapkan dalam Triwulan IV Tahun 2022, sehingga belum ada penetapan target maupun capaian realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.

IKK Jumlah BLUD dengan MRI \geq level 3 diukur dengan Jumlah BLUD yang mengimplementasikan pengelolaan/ manajemen risiko.

Perbandingan Target dan Realisasi IKK “Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



b. Pendukung Pengawasan

Sesuai dengan perubahan perjanjian kinerja Tahun 2022, Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta mempunyai 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan (IKK) dengan capaian kinerja diuraikan sebagai berikut:

1) IKK: Nilai Zona Integritas Unit Kerja

Nilai Zona Integritas Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 91,16

Target IKK "Nilai Zona Integritas Unit Kerja Tahun 2022 sebesar 90,00.

Nilai Skor Zona Integritas diukur sesuai dengan Pedoman Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.

Realisasi Nilai Zona Integritas Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 91,16 berdasarkan penilaian dari Inspektorat BPKP.

Target dan realisasi IKK "Nilai Zona Integritas" dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



2) IKK: Skor IKPA Unit Kerja

Skor IKPA Unit Kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 96,77

Target IKK "Skor IKPA Unit Kerja Tahun 2022 sebesar 95,00. Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 96,77 atau tercapai sebesar 101,86 % dari target Tahun 2022 sebesar 95,00.

Skor IKPA diukur dengan skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Skor IKPA Unit Kerja” dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



3) IKK: Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

Persentase penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 100%

Target IKK “Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP” pada Tahun 2022 sebesar 100,00%. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 capaian telah tercapai 100,00% dari target Tahun 2022 maupun target akhir renstra periode 2020-2024 sebesar 100,00%. Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta telah menyusun Laporan Keuangan Tahun 2021 dengan Nomor: LAP-18/PW12/1/2022 tanggal 7 Februari 2022 disusun sesuai SAP (PP 71 Tahun 2010).

Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP diukur dengan jumlah Laporan Keuangan yang sesuai kriteria SAP dibagi Laporan Keuangan yang terbit dikalikan 100%.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP” dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



4) IKK: Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja

Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 0

Target IKK “Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja” pada Tahun 2022 sebesar 80,00. Target atas IKK tersebut ditetapkan dalam Triwulan IV Tahun 2022, sehingga belum ada penetapan target maupun capaian realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.

Pengelolaan BMN diukur berdasarkan hasil penilaian mandiri yang divalidasi oleh Biro Umum BPKP.

Target dan realisasi “Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja” dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



5) IKK: Nilai SAKIP Unit Kerja

Nilai SAKIP Unit Kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 0

Target IKK “Nilai SAKIP Unit Kerja” pada Tahun 2022 sebesar 87,00. Target atas IKK tersebut ditetapkan dalam Triwulan IV Tahun 2022, sehingga belum ada penetapan target maupun capaian realisasi sampai dengan Triwulan II

Tahun 2022.

Belum ada target maupun realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.

Nilai SAKIP diukur dengan hasil *Self Assesment* SAKIP yang telah dilakukan *Quality Assurance* (QA) oleh Inspektorat BPKP. Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Eselon II dengan perencanaan strategis unit di bawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.

Target dan realisasi IKK “Nilai SAKIP Unit Kerja” dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



6) IKK: Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)

Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja) Perwakilan D.I. Yogyakarta sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2022 sebesar 88,89%

Target IKK “Persentase Penyelesaian RTP” pada Tahun 2022 sebesar 100,00%. Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Triwulan II Tahun 2022 dari 9 kegiatan pengendalian telah terealisasi sebanyak 8 kegiatan pengendalian atau telah tercapai

88,89%.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) unit kerja dihitung berdasarkan jumlah RTP yang diselesaikan dibagi dengan jumlah RTP dikali 100%. Penilaian ini digunakan dalam rangka menilai penerapan manajemen risiko pada unit kerja. Berdasarkan aplikasi yang digunakan oleh unit kerja yaitu Bewise. Perbandingan target dan realisasi capaian IKK “Persentase Penyelesaian RTP” dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



7) IKK: Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)

Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja) Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 93%

Target IKK “Persentase Efektivitas Pengendalian Intern” pada Tahun 2022 sebesar 65,00%. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, sudah terealisasi sebesar 93%.

Efektivitas pengendalian intern dihitung dengan perhitungan (Jumlah pengendalian eksisting yang efektif +

Jumlah RTP yang selesai dan efektif) / (Jumlah seluruh pengendalian eksisting + Jumlah RTP yang Selesai) x 100%.

Persentase efektifitas pengendalian intern sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 telah tercapai 93% atau tercapai 143,08 dari target 65,00%. Persentase efektifitas pengendalian intern sebesar 93% dihitung sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
a. Jumlah Pengendalian <i>existing</i>	111
b. Jumlah Pengendalian <i>existing</i> efektif	103
c. Jumlah RTP	10
d. Jumlah RTP efektif	10
Persentase Efektivitas Pengendalian intern (b+d)/(a+c)x100%= 113/121= 93,38%	93 %

Perbandingan target dan realisasi capaian IKK “Persentase Penyelesaian RTP” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.



8) IKK: Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja

Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja Perwakilan BPKP D.I. sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 84,85

Target IKK “Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja” pada Tahun 2022 sebesar 75. Berdasarkan hasil survey kepuasan mitra BPKP Tahun 2022 nilai kepuasan mitra telah tercapai sebesar 84,85 atau telah tercapai sebesar 113,13%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra Tahun 2020-2024 telah tercapai 101,01% dari target sebesar 81.

Indeks kepuasan layanan unit kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta diukur dengan hasil survey kepada para mitra di lingkungan unit kerja.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja” dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



Rincian target dan realisasi *outcome* sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 pada Lampiran.

3. Pelaksanaan APP dan APPD

a. Pelaksanaan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) Tahun 2022

- Topik Pengawasan dalam Perjanjian Kinerja APP Tahun 2022

Berdasarkan perjanjian kinerja APP Tahun 2022, pada Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta mempunyai target APP sebanyak 65 Topik Pengawasan dan target sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 24 Topik Pengawasan. Setiap Topik Pengawasan yang telah terbit laporan hasil pengawasan harus dibuat Sintesa Hasil Pengawasan (SHP).

Target dan Realisasi Topik Pengawasan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sesuai perjanjian kinerja berdasarkan aplikasi Monsima dan SIMA-X per 30 Juni 2022 sebagai berikut:

No	Target APP = Topik Pengawasan	TW Target	Bidwas	Keterangan
1	Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional	2	IPP	SHP sudah TTE
2	Bantuan Operasional Sekolah	1	IPP	SHP sudah TTE
3	Program Indonesia Pintar (KIP dan KIP Kuliah)	2	IPP	SHP sudah TTE
4	Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2	IPP	SHP sudah TTE
5	Penanganan Covid-19 (Vaksinasi)	1,2,3,4	IPP	- SHP TW 1 sudah TTE - SHP TW 2 belum input
6	Penanganan Covid-19 (Pembayaran Klaim Rumah Sakit)	1,2,3,4	AN/IPP	- SHP TW 1 dan 2 sudah TTE
7	Peningkatan Tata Kelola Data Terpadu Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah (DTKS dan Basis Data Terkait Lainnya)	1	IPP	SHP sudah TTE
8	Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)	2	IPP	SHP sudah TTE
9	Implementasi Bansos APBD	2	APD	SHP sudah TTE
10	Implementasi Bansos APBDesa	2	APD	SHP sudah TTE
11	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	1	APD	SHP sudah TTE
12	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	1,2	APD	- SHP TW 1 sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik - SHP TW 2 sudah TTE
13	Optimalisasi PAD	2	APD	SHP sudah TTE

No	Target APP = Topik Pengawasan	TW Target	Bidwas	Keterangan
14	Pemanfaatan APBD untuk PC-PEN (termasuk TKDD)	1,2,3,4	APD	- SHP TW 1 sudah TTE - SHP TW 2 sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
15	Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa (Perencanaan)	I	APD	SHP sudah TTE
16	Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa (Akuntabilitas)	1,2,3,4	APD	- SHP TW 1 sudah TTE - SHP TW 2 sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
17	Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa	I	APD	SHP sudah TTE
18	Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro	2,4	IPP	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
19	Fasilitasi Kredit Pemerintah untuk UMKM (KUR dan Non KUR, baik reguler maupun tambahan)	2,4	AN	SHP belum selesai Input
20	Kemudahan Perizinan (OSS)	1	APD	-Berdasarkan aplikasi Monsima di TW II -SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
21	P3DN (fokus pada Industri Kesehatan Industri Energi, Industri Jasa Konstruksi dan 10 K/L dengan anggaran terbesar)	1	IPP	-Berdasarkan aplikasi Monsima di TW II - SHP belum input
22	Pencegahan Kecurangan	2	Investigasi	SHP sudah TTE
23	Deteksi Kecurangan	2	Investigasi	Berdasarkan aplikasi Monsima di TW III
24	Respon Kecurangan	2	Investigasi	SHP sudah TTE

Namun terdapat realisasi APP sebanyak 4 topik pengawasan yang tidak ditargetkan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Topik Pengawasan	Bidwas	Keterangan
1	Kartu Indonesia Pintar	IPP	SHP sudah TTE
2	SPIP	APD	SHP TW 4
3	Kapabilitas APIP	P3A	SHP TW 4
4	Pengembangan Potensi Desa	AN/APD	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik.

- Topik Pengawasan yang Tidak Ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja APP 2022

Terdapat 8 topik pengawasan yang sudah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 yang tidak ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja APP Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Topik Pengawasan	Bidwas	Keterangan
1	Penanganan Covid-19-PBJ (Alat <i>Testing/Tracing</i> , Almatkes, Obat dan Faskes Penanganan Covid-19 (Vaksinasi))	APD	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
2	Optimalisasi Pemanfaatan KPBU	IPP	SHP sudah TTE
3	Penempatan Dana	AN	SHP sudah TTE
4	Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan	IPP	SHP sudah TTE
5	BLU/BLUD (Fokus pada BLU/BLUD Kesehatan dan BLU/BLUD Pendidikan)	AN	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
6	BUMD (Fokus pada BU Jasa Air dan BPD)	AN	SHP belum selesai Input
7	P3DN Badan Usaha	AN	Belum input
8	P3DN Pemerintah Daerah	APD	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik

- Non Prioritas yang Tidak Ditargetkan Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Terdapat 8 Topik pengawasan kategori non prioritas yang sudah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Topik Pengawasan	Bidwas	Keterangan
1	Pengawasan terhadap Program <i>for Result</i> untuk <i>Disbursement Linked Indicators</i> (DLI) Program Reformasi Bantuan Sosial	IPP	SHP sudah TTE
2	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah	APD	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
3	Pengawasan Sisa Bos Tahun 2011 dan 2019 pada Pemerintah Daerah	APD	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
4	Kualitas Pengendalian Intern	AN	SHP TW 4
5	Audit Keuangan atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri;	IPP	SHP sudah TTE

No	Topik Pengawasan	Bidwas	Keterangan
6	Audit Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Kementerian PUPR	IPP	SHP di SIMA-X TW 2 tidak ada
7	Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP)	IPP	SHP belum input
8	Peningkatan Akuntabilitas Aset Daerah	APD	SHP belum input

- Dukungan Pengawasan yang Tidak Ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Terdapat 2 Topik pengawasan kategori Dukungan Pengawasan yang sudah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Topik Pengawasan	Bidwas	Keterangan
1	Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan (PAEP)	P3A	SHP TW 1 dan 2 di SIMA-X tidak ada
2	Penerapan JFA pada APIP K/L/D	P3A	SHP di TW 3

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran 2.

b. Pelaksanaan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) Tahun 2022

Berdasarkan perjanjian kinerja APPD Tahun 2022, pada Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta mempunyai target APPD sebanyak dua topik dengan target di Triwulan IV yaitu:

No	Topik	Bidwas	Keterangan
1	Pengelolaan atas Pengelolaan Sampah Terpadu (PST) Piyungan	IPP	Target TW IV
2	Pengawasan atas Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Wilayah DIY	APD	Target TW IV

Namun demikian berdasarkan aplikasi MONSIMA dan SIMA-X , jumlah APPD yang ada sebagai berikut:

No	Topik	Target PKPT	Bidwas	Keterangan
1	Pengelolaan atas Pengelolaan Sampah Terpadu (PST) Piyungan	2,3	IPP	SHP belum input
2	Pengawasan atas Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Wilayah DIY	4	APD	
3	Pengembangan Kewirausahaan Baru untuk Pemulihan Ekonomi	4	IPP	

Rincian lihat di Lampiran 3.

4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT) yang Mendukung Pencapaian *Outcome* dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

a. PKPT Tahun 2022

PKPT pada Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 108 PKPT dengan PP/Lokus sebanyak 266 PP.

Berdasarkan aplikasi New MONSIMA per 30 Juni 2022, realisasi penugasan pengawasan s.d Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 170 PP atau tercapai 63,91% dari rencana Tahun 2022 sebanyak 266 Penugasan Pengawasan (PP). Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 111 LHP atau 41,73% dari rencana Tahun 2022 sebanyak 266 LHP. Sedangkan realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 111 LHP, jika dibandingkan dengan penerbitan surat tugas sebanyak 170 ST telah tercapai 65,29%.

Realisasi PKPT Tahun 2022 s.d. Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 44 PKPT atau 88,00% dari rencana di Triwulan II sebanyak 50 PKPT. Jika dibandingkan dengan rencana satu tahun, maka realisasi PKPT sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tercapai 40,74 % dari total PKPT 108 PKPT.

Rincian realisasi PKPT, penerbitan surat tugas dan penerbitan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

No	Bidang	Target			Realisasi ^{*)}			Capaian (%)				% Realisasi LHP Dibandingkan Realisasi ST
		Tahun 2022		S.d TW 2	S.d TW 2			s.d TW 2	Tahun 2022			
		PKPT	PP	PKPT	PKPT	PP	LHP	PKPT	PKPT	PP	LHP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/5	10=6/3	11=7/4	12=8/4	13=8/7
1	IPP	54	103	20	16	49	35	80,00	24,07	47,57	33,98	71,43
2	APD	23	78	16	16	46	32	100,00	65,22	58,97	41,03	69,57
3	AN	22	40	11	6	31	18	54,54	27,27	77,50	45,00	58,06
4	Investigasi	5	30	2	2	17	8	100,00	40,00	56,67	26,67	47,05
5	P3A	4	15	1	4	27	18	400,00	100,00	180,00	129,00	66,67
Jumlah		108	266	50	44	170	111	88,00	40,74	63,91	41,73	65,29

Ket:

*) Realisasi PKPT mengacu pada penerbitan laporan

Dari hasil monitoring pada aplikasi New MONSIMA terdapat PKPT yang RMPnya sampai dengan bulan Juni Tahun 2022, namun belum diterbitkan surat tugasnya sampai dengan 30 Juni 2022 yaitu:

No	Bidang	ID PKPT	Nama PKPT	RMP	TW PKPT	Keterangan
1	Investigasi	102304	Respon Kecurangan	Maret	1,2,4	Rencana Realisasi Bulan Juli 2022
2	AN	103039	Pengawasan Fasilitas Kredit Pemerintah untuk UMKM (Non KUR dan subsidi bunga/subsidi margin)	Maret	2 dan 4	Menunggu pedoman Pusat
3	AN	103206	Reviu Tata Kelola SPAM pada BU Jasa Air	April	4	Menunggu pedoman Pusat
4	AN	103675	Pengawasan Akses Permodalan bagi Masyarakat Miskin	Januari	3	Menunggu pedoman Pusat
5	AN	104815	Pengawasan atas Penyaluran Bantuan Sosial Beras	Mei	2	Menunggu pedoman Pusat
6	AN	104822	Pengawasan atas Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah pada BUMN	Juni	3	Menunggu pedoman Pusat
7	IPP	105299	Verifikasi <i>Disbursement Linked Indicators</i> (DLI) atas program yang dibiayai oleh pinjaman dan bantuan luar negeri	Mei	2,3,4	Menunggu pedoman Pusat
8	IPP	105821	Bimtek Manajemen Risiko Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 pada KPU dan Bawaslu	Juni	2,4	Menunggu pedoman Pusat

b. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari produktif pengawasan PKPT sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebanyak 6.684 OH atau 62,33% dari rencana hari pengawasan satu tahun sebanyak 10.723 OH dengan rincian sebagai berikut:

No	Bidang	Target OH	Realisasi OH	%
1	IPP	4.112	2.521	61,31
2	APD	3.067	1.720	56,08
3	AN	2.755	1.132	31,18
4	Investigasi	647	625	41,09
5	P3A	142	686	483,09
Jumlah		10.723	6.684	62,33

c. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran s.d. Triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp13.575.840.706,00 atau 43,53% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp31.185.165.000,00 . Rincian realisasi pengawasan sebagai berikut:

- Realisasi anggaran Program Pengawasan Pembangunan s.d. Triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp570.454.746,00 atau 21,64% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 2.636.228.000,00.



- Realisasi anggaran Program Dukungan Manajemen s.d. Triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp13.005.385.960,00 atau 45,55% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp28.548.937.000,00.



Rencana dan realisasi anggaran s.d. bulan Triwulan II Tahun 2022 secara rinci lihat di Lampiran 4.

d. Hal-hal yang perlu diperhatikan

Sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- Terdapat target Indikator Kinerja Kegiatan di akhir periode Renstra 2020-2024 yang lebih kecil daripada target di Tahun 2022, karena belum ada informasi terkait revisi Renstra dari Biro MKOT.
- Penyerapan anggaran Program Pengawasan Pembangunan masih rendah yaitu baru sebesar 21,64% dari anggaran.
- Terdapat PKPT yang RMPnya sampai dengan bulan Juni 2022 namun belum diterbitkan surat tugasnya sebanyak 8 PKPT yaitu Bidang Investigasi sebanyak 1 PKPT, Bidang AN sebanyak 5 PKPT dan Bidang IPP sebanyak 2 PKPT. Dari 8 PKPT tersebut 6 PKPT direncanakan direalisasikan bulan Juli 2022 dan 7 PKPT menunggu pedoman dari Rendal.
- Terdapat SHP yang belum selesai/final.
- Sintesa Hasil Pengawasan yang telah ditandatangani Kepala Perwakilan dan berbarcode belum terunggah ke SIMA-X.

e. Usulan/Saran Perbaikan

Atas hal-hal yang perlu diperhatikan di atas, kami menyampaikan usulan/saran sebagai berikut:

- Berkonsultasi dengan Biro MKOT untuk segera melakukan revisi Renstra
- Semua bidang pengawasan segera mempercepat penyerapan anggaran.
- Semua bidang agar menyelesaikan SHP yang belum final.
- Untuk SHP yang telah disetujui Kepala Perwakilan dan berbarcode agar diunggah dalam aplikasi SIMA-X.

Demikian kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta s.d. Triwulan II Tahun 2022. Atas perkenan Bapak Kepala Perwakilan, kami ucapkan terima kasih.

Korwas Bidang P3A, *h*


Ratna Wijihastuti

**Target dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi				
			Satuan	TW II Tahun 2022	2022	2024	TW II Tahun 2022	% Realisasi thd target TW II	% Realisasi thd target 2022	% Realisasi thd target 2024	
1	2 Peningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	3 1.1 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi 1.2 Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi 1.3 Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah 1.4 Nilai penyelamatan keuangan Negara dan daerah	4	5	6	6	5	6	7	8	
Rp (Juta)			-	701,00	1.029,00	-	-	-	-	-	
Rp (Juta)			-	2.394,49	1.714,00	4.928,68	205,83	287,55			
Rp (Juta)			75.000,00	154.478,00	112.939,00	123.064,57	164,09	79,66	108,97		
			Rp (Juta)	-	99.430,00	103.964,00	765,96	0,77	200,00	200,00	
2	2 Peningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1 Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target 2.2 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	PSN	-	1,00	1,00	2,00	-	-	-	
				Persen	-	85,00	85,00	-	-	-	-
3	3 Peningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	3.1 Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik 3.2 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat 3.3 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat 3.4 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMN	-	1,00	1,00	-	-	-	-	
				BUMD	100,00	11,00	11,00	11,00	100,00	100,00	
				BLUD	-	1,00	2,00	1,00	100,00	100,00	50,00
				BUMDes	14,00	19,00	26,00	14,00	73,68	53,85	
4	4 Peningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	4.1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti 4.2 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti 4.3 Jumlah Pemda menindak lanjut Area Of Improvement dari hasil pengukuran EPK 5.1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 5.2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 5.3 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3 5.4 Jumlah Kabupaten/kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3 5.5 Jumlah Provinsi dengan MRI ≥ Level 3 5.6 Jumlah Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
				Persen	-	80,00	90,00	100,00	125,00	111,11	
				Pemda	-	1,00	-	2,00	200,00	100,00	100,00
				Prov	-	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00
5	5 Peningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/LP/BU	5.1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 5.2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 5.3 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3 5.4 Jumlah Kabupaten/kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3 5.5 Jumlah Provinsi dengan MRI ≥ Level 3 5.6 Jumlah Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3	Kab/kota	-	11,00	11,00	11,00	100,00	100,00	100,00	
				Prov	-	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
				Kab/kota	-	11,00	11,00	11,00	100,00	100,00	100,00
				Prov	-	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00
			Kab/kota	-	3,00	8,00	-	-	-	-	
			Persen	100,00	100,00	65,00	72,79	72,79	111,98		
			APIP	3,00	4,00	6,00	5,00	125,00	83,33		
			Siswaskeudes								

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi			
			Satuan	TW II Tahun 2022	2022	2024	TW II Tahun 2022	% Realisasi thd target TW II	% Realisasi thd target 2022	% Realisasi thd target 2024
1	2	3	4	5	6	6	5	6	7	8
		5.9	Persen	66,67	66,67	75,00	59,33		87,49	77,77
		5.10	Desa	55,00	135,00	511,00	277,00		205,19	54,21
		5.11	BLUD	-	4,00	7,00	-		-	-
6	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	6.1	Skor Skala 100	-	90,00	79,00	91,69		101,88	116,06
		6.2	Skor Skala 100	-	95,00	90,00	96,77		101,86	107,52
		6.3	Persen	-	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00
		6.4	Nilai	-	80,00		-		-	-
		6.5	Skor Skala 100	-	87,00	84,00	-		-	-
		6.6	Persen	-	100,00		88,89		88,89	-
		6.7	Persen	-	65,00		93,00		143,08	-
		6.8	Indeks Skala 100	-	75,00	81,00	84,85		113,13	104,75

TARGET DAN REALISASI TAHUN 2022
PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	KODE TOPIK	TOPIK PENGAWASAN	UNIT KERJA		TARGET				Realisasi TW I (LHP)	Realisasi TW II (LHP)	SHP TW1	SHP TW2	Keterangan
			RENDAL/ BIDWAS		TW I	TW II	TW III	TW IV					
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2022													
1	A.1.a.	Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional	204 (IPP)		v	-	-	-	v			Sudah TTE	
2	A.1.b.	Peningkatan Sarana-Prasarana Pendidikan	204 (IPP)		-	-	v	-	-				
3	A.1.c.	Bantuan Operasional Sekolah	204 (IPP)	v	-	-	-	-	v		Sudah TTE		
4	A.1.d.	Program Indonesia Pintar (KIP dan KIP Kuliah)	204 (IPP)	-	v	-	-	-	-				
5	A.1.e.	Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	204 (IPP)	-	v	-	-	-	v		Sudah TTE	Sudah TTE	LHP per 30 Juni DL3 (SIMA)
6	A.2.a.	Penanganan Covid-19 (Vaksinasi)	203 (IPP)	v	v	v	v	v	v		Sudah TTE	belum input	
7		Penanganan Covid-19 (Pembayaran Klaim Rumah Sakit)	203 (IPP)	v	v	v	v	v	v		Sudah TTE	Sudah TTE	
8	A.2.b.	Stunting	204 (IPP)	-	-	-	-	-	-				
9	A.2.d.	Reformasi Sistem Kesehatan (Kemandirian Industri Farmasi dan Almatikes)	201 (IPP)	-	-	-	-	-	v				
10		Reformasi Sistem Kesehatan (Layanan Primer)	203 (IPP)	-	-	-	-	-	v				
11		Reformasi Sistem Kesehatan (Layanan Rujukan)	203 (IPP)	-	-	-	-	-	v				
12		Reformasi Sistem Kesehatan (Kualitas dan Redistribusi Tenaga Kesehatan)	203 (IPP)	-	-	-	-	-	v				
13	A.3.a.	Peningkatan Tata Kelola Data Terpadu Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah (DTKS dan Basis Data Terkait Lainnya)	203 (IPP)	v	-	-	-	-	v		Sudah TTE		
14	A.3.c.	Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerjal)	203 (IPP)	-	v	-	-	-	-			Sudah TTE	LHP per 30 Juni DL 2 (SIMA)
15	A.3.d.	Implementasi Bansos APBD	302 (APD)	-	v	-	-	-	-			Sudah TTE	
16	A.3.e.	Implementasi Bansos APBDesa	303 (APD)	-	v	-	-	-	-			Sudah TTE	
17	B.1.a.	Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun)	103	-	-	-	-	-	v				
18	B.1.b.	Infrastruktur SPAM	103	-	-	-	-	-	v				
19			405	-	-	-	-	-	v				
20	B.1.c.	Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)	103	-	-	-	-	-	v				
21	B.2.b.	Infrastruktur Jaringan Irigasi	103	-	-	-	-	-	v				
22	B.3.a.	Pembangunan Jalan	103	-	-	-	-	-	v				
23	B.3.b.	Pembangunan Jembatan	103	-	-	-	-	-	v				
24	B.3.c.	Infrastruktur Jalan Tol	103	-	-	-	-	-	v				
25	B.3.d.	Pembangunan Jalur Kereta Api (termasuk kereta cepat Jkt-Bdg)	103	-	-	-	-	-	v				
26	B.3.e.	Pembangunan Bandara	402	-	-	-	-	-	v				LHP per 30 Juni DL 1 (SIMA)
27	B.4.a.	Penyelesaian BTS	204	-	-	-	-	-	v				
28	B.4.b.	Penyediaan Akses dan Kapasitas Jaringan Internet	204	-	-	-	-	-	v				

NO	KODE TOPIK	TOPIK PENGAWASAN	UNIT KERJA RENDAL/ BIDWAS	TARGET				Realisasi TW I (LHP)	Realisasi TW II (LHP)	SHP TW1	SHP TW2	Keterangan
				TW I	TW II	TW III	TW IV					
29	C.2.a.	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	301	v	-	-	-	v		Sudah TTE		
30	C.2.b.	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	301 (APD)	v	v	-	-	v		Belum TTE	Sudah TTE	LHP di tw 2 DL1 (SIMA)
31	C.2.c.	Optimalisasi PAD	301	-	v	-	-	-			Sudah TTE	LHP per 30 Juni 2022 belum terbit (SIMA)
32	C.2.d.	Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah melalui Ketepatan dan Efektivitas Dan transfer (fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah)	302	-	-	v	-	-				
33	C.2.f.	Pemanfaatan APBD untuk PC-Pen (termasuk TKDD)	302	v	v	v	-	v		Sudah TTE	Belum TTE	
34	C.3.a.	Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa (Perencanaan)	303	v	-	-	-	v		Sudah TTE		
35		Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa (Akuntabilitas)	303	v	v	v	-	v		Sudah TTE	Belum TTE	
36	C.3.b.	Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa	303	v	-	-	-	v		Sudah TTE		
37	C.4.a.	BUMN	401	-	-	v	-	-				
38	D.1.a.	Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro	104	-	v	-	-	v		belum TTE		
39	D.1.b.	Fasilitas Kredit Pemerintah untuk UMKM (KUR dan Non KUR, baik reguler maupun tambahan)	403	-	v	-	-	v		belum selesai	belum TTE	LHP per 30 juni DL 3 (SIMA)
40	D.3.b.	Kemudahan Perizinan (OSS)	302	v	-	-	-	-			belum TTE	simas TW 2
41	D.4.b.	P3DN (fokus pada Industri Kesehatan Industri Energi, Industri Jasa Konstruksi dan 10 K/L dengan anggaran terbesar)	104 (IPP)	v	-	-	-	-		-	Belum input	simas TW 2
42	D.5.a.	Pengembangan DPSP	104	-	-	-	-	v				
43	D.5.b.	Bantuan Stimulus kepada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Masa Pandemi Covid-19	104	-	-	-	-	v				
44	E.1.a.	Tata Kelola Subsidi Pupuk	403	-	-	v	-	-				
45	E.1.b.	Tata Kelola Program Benih Unggul (Padi) (Dana Kementerian Pertanian)	102	-	-	v	-	-				
46		Tata Kelola Program Benih Unggul (Padi) (Dana Kementerian Desa dan APBD)	302	-	-	v	-	-				
47		Tata Kelola Program Benih Unggul (Padi) (Dana Kementerian Desa dan APBD)	303	-	-	v	-	-				
48	E.1.c.	Tata Kelola Program Bibit Ternak	102	-	-	v	-	-				
49		Tata Kelola Program Bibit Ternak	302	-	-	v	-	-				
50		(Dana Kemendes PDTT dan APBD)	303	-	-	v	-	-				
51	E.2.a.	Dukungan Peralatan Produksi Pertanian	102	-	-	v	-	-				
52		Dukungan Peralatan Produksi Pertanian (Dana Kemendes PDTT dan APBD)	302	-	-	v	-	-				
53		Dukungan Peralatan Produksi Perikanan (Dana Kemendes PDTT dan APBD)	303	-	-	v	-	-				
54	E.2.b.	Dukungan Peralatan Produksi Perikanan	102	-	-	v	-	-				
55	E.3.c.	Infrastruktur Pelabuhan Perikanan	102	-	-	v	-	-				
56		Infrastruktur Pelabuhan Perikanan (Pemda)	302	-	-	v	-	-				
57	E.5.a.	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah	401	-	-	v	-	-				
58	F.1.a.	Reformasi Birokrasi	205	-	-	v	-	-				
59	F.1.b.	SPIP	304	-	-	v	-	v				SHP di SIMA-X Tw 4
60	F.1.c.	Kapabilitas APIP	304	-	-	v	-	v				SHP di SIMA-X Tw 4

NO	KODE TOPIK	TOPIK PENGAWASAN	UNIT KERJA RENDAL/ BIDWAS	TARGET				Realisasi TW I (LHP)	Realisasi TW II (LHP)	SHP TW1	SHP TW2	Keterangan
				TW I	TW II	TW III	TW IV					
61	F.2.a.	Pencegahan Kecurangan	501	-	V	-	-	V	Sudah TTE	Sudah TTE	di SIMA TW 3, SHP di SIMA-X TW 3	
62	F.2.b.	Deteksi Kecurangan	502	-	V	-	-	-	-	-		
63	F.2.c.	Respon Kecurangan	503	-	V	-	-	V	Sudah TTE	Sudah TTE		
64	G.2.b.	Kartu Sembako	203	-	-	V	-	-	-	-		
65	G.2.d.	Kartu Indonesia Pintar	302	-	-	V	-	V	Sudah TTE		di SIMA-X TW 1	
66	G.3.c.	Pengembangan Kerampilan dan Layanan Usaha	104	-	-	V	-	-	-	-		
67	G.3.e.	Optimalisasi Program Padat Karya	102	-	-	V	-	-	-	-		
68			103	-	-	V	-	-	-	-		
69	G.3.f.	Pengembangan Potensi Desa	303 (AN/APD)	-	-	V	-	V	Belum TTE		di SIMA AN TW 1, APD TW 3	
B. APP tidak ditargetkan dalam perjanjian Kinerja												
1		Penanganan Covid-19-PBJ (Alat Testing/Tracing, Almatkes, Obat dan Faskes/ Penanganan Covid-19 (Vaksinasi)	APD	V	V	V	V	V	Belum TTE	Belum TTE		
2		Optimalisasi Pemanfaatan KPBU	IPP	V			V	V	Sudah TTE			
3		Penempatan Dana	AN	V			V	V	Sudah TTE			
4		Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan	IPP	V	V		V	V	Sudah TTE			
5		BLU/BLUD (Fokus pada BLU/BLUD Kesehatan dan BLU/BLUD Pendidikan)	AN		V		-	-	Sudah TTE	Belum TTE	laporan per 30 Juni belum terbit (di sima)	
6		BUMD (Fokus pada BU Jasa Air dan BPD)	AN		V		V	V	Belum selesai	Belum selesai	SHP per 30 Juni belum selesai	
7		Facilitas Kredit Pemerintah untuk UMKM (Non KUR dan subsidi bunga/subsidi margin Non KUR)	AN		V		V	-	-	-	Belum ada instruksi dari rendal	
8		Kartu Indonesia Sehat	IPP			V						
9		P3DN Badan Usaha	AN		V	V	V	V	-	belum input	isi SIMA-X berupa laporan	
10		P3DN Pemerintah Daerah	APD		V	V	V	V		Belum TTE		
11		Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan dan Keperantaraan	AN		V		V					
12		Peningkatan Akses Permodalan	IPP		V		V					
13		Peningkatan Aset Produktif	IPP		V		V					
14		PKH	IPP		V		V					
15		Taia Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	APD		V		V					
C. Non Prioritas tidak ditargetkan dalam perjanjian Kinerja												
		Pengawasan terhadap Program for Result untuk Disbursement Linked Indicators (DLI) Program Reformasi Bantuan Sosial	IPP	V			V	V	Sudah TTE			
		Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah	APD	V			V	V	belum TTE			

NO	KODE TOPIK	TOPIK PENGAWASAN	UNIT KERJA RENDAL/ BIDWAS	TARGET				Realisasi TW I (LBP)	Realisasi TW II (LHP)	SHP TW1	SHP TW2	Keterangan
				TW I	TW II	TW III	TW IV					
		3 Pengawasan Sisa Bos Tahun 2011 dan 2019 pada Pemerintah Daerah	APD	V					belum TTE			
		4 Kualitas Pengendalian Intern	AN				V	V				Belum SHP
		5 Audit keuangan atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	IPP		V	V		V			Sudah TTE	LHP DL 2 (SIMA), di SIMA-X tidak ada di tw 2
		6 (PISW) Kementerian PUPR	IPP		V							belum realisasi, belum ada pedoman
		7 2024 pada KPU dan Bawaslu	IPP				V					
		8 BLU/BLUD, BUMD, BUMDES					V					
		9 Kontribusi atas Pembangunan Nasional					V					
		10 Penanggulangan Bencana	IPP			V						
		11 Pengadaan PPPK Formasi Tahun 2022					V					
		12 Pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara/daerah					V					
		13 Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan					V					
		14 Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategis RKP Tahun 2022					V				belum input	
		15 Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP)	IPP		V						belum input	
		16 Peningkatan Akuntabilitas Aset Daerah	APD		V							LHP DL 2 (SIMA)
		17 Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Kesehatan					V					
		18 Revisi Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	IPP				V					
C. Dukungan Pengawasan tidak ditargetkan dalam perjanjian kinerja												
		Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan (PAEP)	P3A	V	V	V	V	V				SHP di SIMA-X TW 1, dan 2 tidak ada
		Penerapan JFA pada AP/ K/L/D	P3A				V	V				SHP di SIMA-X TW 3

TARGET DAN REALISASI TAHUN 2022
PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN DAERAH
S.D TW II TAHUN 2022

NO	NAMA CLUSTER	TEMA PENGAWASAN	INFORMASI YANG DIHARAPKAN	TARGET PELAPORAN				Realisasi TW I (LHP)	Realisasi TW II (LHP)	SHP TW I	SHP TW II	Keterangan
				TW I	TW II	TW III	TW IV					
A Perjanjian Kinerja Tahun 2022												
1	Pariwisata	Pengawasan atas Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Wilayah DIY	<p>1. Analisis desain/kebijakan atas Program Bantuan Keuangan Khusus Keistimewaan kepada Pemerintah Kabupaten di Wilayah DIY.</p> <p>2. Analisis tata kelola, identifikasi risiko, serta permasalahan strategis Program Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kabupaten di Wilayah DIY.</p> <p>3. Analisis capaian kinerja, efektivitas, dan akuntabilitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kabupaten di Wilayah DIY.</p> <p>4. Analisis kinerja Program Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kabupaten di Wilayah DIY khususnya target tata ruang dan wilayah dan kebudayaan dibandingkan dengan dampak ke peningkatan pelayanan publik, pelestarian kekayaan budaya, pariwisata, dan ekonomi regional.</p> <p>5. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</p>				√	√			belum SHP	

NO	NAMA CLUSTER	TEMA PENGAWASAN	INFORMASI YANG DIHARAPKAN	TARGET PELAPORAN				Realisasi TW I (LHP)	Realisasi TW II (LHP)	SHP TW I	SHP TW II	Keterangan
				TW I	TW II	TW III	TW IV					
A Perjanjian Kinerja Tahun 2022												
2	Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	Pengelolaan atas Pengelolaan Sampah Terpadu (PST) Piyungan	<p>1. Analisis desain/kebijakan atas Pengelolaan Sampah Terpadu (PST) Piyungan.</p> <p>2. Analisis tata kelola, identifikasi risiko, serta permasalahan strategis Pengelolaan Sampah Terpadu (PST) Piyungan.</p> <p>3. Analisis capaian kinerja, efektivitas dan akuntabilitas Pengelolaan Sampah Terpadu (PST) Piyungan.</p> <p>4. Analisis kinerja Pengelolaan Sampah Terpadu (PST) Piyungan dihubungkan dengan dampak terhadap penurunan pencemaran lingkungan, peningkatan aksesibilitas masyarakat ke kesehatan dasar dan peningkatan layanan dasar dan indikator kesehatan masyarakat.</p> <p>5. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</p>			√	√	√		belum input	di sima x di tw 2	
B APBD tidak ditargetkan dalam perjanjian Kinerja												
1	Stimulus dan Dukungan terhadap UMKM	Pengembangan Kewirausahaan Baru untuk Pemulihan Ekonomi	"Akuntabilitas keuangan dan capaian program pengembangan UMKM, Analisis peningkatan produktivitas UMKM terhadap pendapatan pelaku usaha UMKM dan kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian regional (PDRB). Identifikasi hambatan dan permasalahan. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait.				√	√			belum SHP	

PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
Realisasi Penyerapan Anggaran
s.d. Juni 2022

No	Kode	Program/IOK	Anggaran			Realisasi s.d. Bulan Ini		% Capaian Penyerapan	
			Tahun 2022	s.d. Bulan Ini	Realisasi s.d. Bulan Ini	Terhadap Anggaran 2022	Terhadap Rencana s.d. Bulan Ini		
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)		
1		2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100		
A	089.01.CH	Program Pengawasan Pembangunan							
1	FAG.005	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan atas Program Pembangunan Regional	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	100,00%	
2	FAG.011	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengembangan JFA	21.731.000,00	2.044.043,00	2.044.043,00	9,41%	100,00%	100,00%	
3	FAG.012	Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut	80.000.000,00	17.654.600,00	17.654.600,00	22,07%	100,00%	100,00%	
4	FAG.U02	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Daerah	218.561.000,00	82.753.031,00	82.753.031,00	37,86%	100,00%	100,00%	
5	FAG.U06	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Badan Usaha	34.878.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	27,52%	100,00%	100,00%	
6	FAG.U07	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengendalian Korupsi	30.000.000,00	12.980.000,00	12.980.000,00	43,27%	100,00%	100,00%	
B	089.01.CH	Sub Jumlah Program A	485.170.000,00	125.031.674,00	125.031.674,00	25,77%	100,00%	100,00%	
1	UAG.U03	Program Pengawasan Pembangunan (ABT)	1.960.419.000,00	422.050.009,00	422.050.009,00	21,53%	100,00%	100,00%	
2	UAG.U09	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	63.639.000,00	13.158.063,00	13.158.063,00	20,68%	100,00%	100,00%	
3	UAG.U10	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	127.000.000,00	10.215.000,00	10.215.000,00	8,04%	100,00%	100,00%	
		Sub Jumlah Program B	2.151.058.000,00	445.423.072,00	445.423.072,00	20,71%	100,00%	100,00%	
		Sub Jumlah Program Pengawasan	2.636.228.000,00	570.454.746,00	570.454.746,00	21,64%	100,00%	100,00%	
B	089.01.WA	Program Dukungan Manajemen	456.280.000,00	119.157.769,00	119.157.769,00	26,06%	99,79%	99,79%	
1	3676.EBA.962	Layanan Umum	28.092.657.000,00	12.937.479.390,00	12.886.473.584,00	45,87%	99,61%	99,61%	
2	3676.EBA.994	Layanan Perkantoran	28.548.937.000,00	13.056.637.159,00	13.005.385.960,00	45,55%	99,61%	99,61%	
		Sub Jumlah Program B	31.185.165.000,00	13.627.091.905,00	13.575.840.706,00	43,53%	99,62%	99,62%	
		Total							